

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Palu: Sinar Grafika.
- Eddyono, S. W., & Abidin, Z. (2016). *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, A., & Poernomo, F. (2017). *Hukum Administrasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ismail, Z. (2023). *Buku Ajar Perlindungan Saksi Dan Korban*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Miharja , M. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Cendekia Press
- Paripurna, A., Astutik, Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ramlan, Erwinsyahbana, T., & Perdana, S. (2023). *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU PRESS.
- Rodliyah, & H.S, S. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 TAHUN 2023)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sholihin, M. F., & Yulianingsih, W. (2015). *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: :Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunarso, S. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, B. (2011). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, B. (2023). *Hukum Pidana Dan Peradilan Pidana*. Jakarta: LPPM Press.

Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Artikel dalam jurnal :

Agustina, W., & Wiraguna, S. A. (2025). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 117-127. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486554>

Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, 33(2), 260. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>

Ariesta, W. (2024). Studi Komparasi Perlindungan Hukum Data Pribadi UNI Eropa dan Indonesia Dalam Prinsip the Right To Be Forgotten Menurut Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum*, 162-177. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i2.160>

Azizah, A. (2020). Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal. *Simbur Cahaya*, 184-206. <https://doi.org/10.28946/sc.v26i2.541>

Fachrie, Y., Zurnetti, A., & Rias, I. (2025). Implementasi Restitusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Nomor 1/RES.PID/2023/PN BKT). *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, 4898-4908.

Fitriani. (2025). Prosedur Pengajuan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Perkara Pidana. *jdih.mahkamahagung*, 1-8.

- Goklas, C., & Harefa, B. (2021). Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Membantu Pemberian Restitusi Pada Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 892-905.
- Hanaya, E. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Bevinding*, 11-22. <https://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/view/1027>
- Kautsar, I. A., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 84-97. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Kholifah, U. N. (2025). Analisis Konsep-konsep Hukum di Indonesia. *JUSTITIABLE*, 46-61. <https://doi.org/10.56071/justitable.v7i2.1161>
- Kurniawan, G. A., Samsithawrati, A. P., & Lulo, L. D. (2023). Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*. *Jurnal Ius Constituendum*, 115-131.
- Lugianto, A. (2014). Rekonstruksi Perlindungan Hak-hak Korban Tindak Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 553-559. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.553-559>
- Lustarini, M. (2024). Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022. *JDIH Kominfo*, 1-15. https://jdih.komdigi.go.id/artikel_hukum/artikel-hukum/t/jurnal-hukum/83
- Mangku, D. G., & Yulianti, N. R. (2021). *Legal Protection Of Women And Children In Buleleng District. South East Asia Journal Contemporary Business*, 41-46.
- Mangku, D. G., Yulianti, N. P., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. (2021). *The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. Journal of Southwest Jiaotong University*, 202-209.

- Milafebina, R. (2023). Perlindungan Data Pribadi terhadap Kebocoran Data Pelanggan *E-commerce* di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 157-169. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.331>
- Mursito. (2024). Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana. *Judge : Jurnal Hukum*, 133-140.
- Ngompat, Y. L., & Maran, M. G. (2024). *Legal Development and Urgency of Personal Data Protection in Indonesia. Journal of Indonesia Law & Policy Review*, 627-635. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v5i3.284>
- Nirwana, M. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Individual. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 93-104. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.609>
- Pramesti, F. A. (2024). Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona . *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 250–262. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3888>
- Putri, N. M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, 240-245. <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.8087.240-245>
- Ramadhani, G., & Suhardiman, C. (2026). Kebuntuan Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi dan Implikasinya terhadap Efektivitas UU PDP di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 793-805.
- Safari, B. A., & Hakim, F. (2023). Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 120-129.
- Saly, J. N. (2023). Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No.27 Tahun 2022. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 145-153. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i3.28615>

Suari, K. R., & Sarjana, I. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 132-146. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>

Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 82-101.

Suryoutomo, M. (2022). Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 133-149. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>

Tsamara, N. (2021). Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara. *Jurnal Suara Hukum*, 53-84. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84>

Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 93-111. <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>

Yuliartini, N. P., Hartana, H., Kbarek, L. N., & Monteiro, S. (2025). *From Retribution to Restoration: Human Rights-Based Legal Protection for Women Victims of Sexual Violence*. *Jurnal Media Hukum*, 281-300.

Yuliartini, N. P., Mangku, D. S., Parwati, N. E., & Yudiawan, I. H. (2024). *Human Rights as Fundamental and Universal Rights in Regulating the Fulfillment of the Rights of Women Victims of Sexual Violence*. *International Journal of Social Science Humanity & Management Research*, 456-460.

Artikel Dalam Internet:

CNN Indonesia. (2023, mei 22). *Kominfo Klarifikasi Soal Dugaan Bocoran Data BSI yang Beredar*. Diakses pada 21 Juli 2025, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230522122857-192-952382/kominfo-klarifikasi-soal-dugaan-bocoran-data-bsi-yang-beredar>

Hermanto, B. (2025, November 3). *Januari-Agustus 2025, Ada 2.597 Laporan Masuk Terkait Kejahatan Siber*. Diakses pada 22 April 2026,

<https://mediahub.polri.go.id/in/image/detail/279752-januariagustus-2025-ada-2597-laporan-masuk-terkait-kejahatan-siber>

komdigi. (2024, Oktober 26). *Era Baru Perlindungan Data Pribadi*. Diakses pada 28 Mei 2026, <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/era-baru-perlindungan-data-pribadi>

komdigi. (2025, agustus 8). *Kejahatan Siber Capai Kerugian Rp 476 M, AI Diperkuat untuk Cegah Ancaman di Ruang Digital*. Diakses pada 28 Mei 2026, <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/kejahatan-siber-capai-kerugian-rp-476-m-ai-diperkuat-untuk-cegah-ancaman-di-ruang-digital>

Prayitno, B. (2025, Desember 18). *Dana Abadi Bagi Korban Tindak Pidana dalam KUHP Baru*. Diakses pada 21 april 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dana-abadi-bagi-korban-tindak-pidana-dalam-kuhap-baru-lt6943b6bd0f8f3/?page=3>

Pudjoharsoyo, A. S. (2026, Februari 28). *Ketika Korban Menunggu Keadilan Yang Tak Kunjung Tiba*. Diakses pada 20 april 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/ketika-korban-menunggu-keadilan-yang-tak-kunjung-tiba-0VE>

siplawfirm. (2025, maret 8). *Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus Pidana*. Diakses pada 25 juli 2025, <https://siplawfirm.id/mechanisme-perlindungan-saksi-dan-korban-dalam-kasus-pidana/?lang=id>

Sunoto. (2026, Januari 21). *KUHAP Baru, Perbedaan Perlakuan Upaya Hukum terhadap Putusan Bebas dan Putusan Lepas*. Diakses pada 20 april 2026, <https://dandapala.com/opini/detail/kuhap-baruperbedaan-perlakuan-upaya-hukum-terhadap-putusan-bebas-dan-putusan-lepas>

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie),
Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537)

